



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan dimulai dengan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pemerintah Kabupaten Bireuen selaku pengemban amanah masyarakat wajib melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah.

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bireuen sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara aparatur pemerintahan dan masyarakat ditunjang dengan komitmen pimpinan daerah



dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memajukan dan memakmurkan segenap masyarakat Kabupaten Bireuen, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2012 - 2017. Keberhasilan atau kegagalan tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

## **A. PENGUKURAN KINERJA**

Kinerja pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat beberapa tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2016 dan RPJM Kabupaten Bireuen periode tahun 2012-2017.

Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan Rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam membandingkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 mengacu pada rumusan yang tertulis di atas dengan skala penilaian sebagai berikut ;

Tabel 3.1  
**Skala Nilai Perangkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	> 85	Sangat Berhasil
2.	$76 < x \leq 85$	Berhasil
3.	$55 < x \leq 75$	Cukup Berhasil
4.	< 55	Tidak Berhasil

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP berguna untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.

**B. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.**

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 dilakukan melalui pendekatan :

1. Membandingkan antara target kinerja (rencana kinerja) dan realisasi kinerja atau pencapaian kinerja tahun 2016.
2. Membandingkan antara capaian realisasi tahun 2016 dengan tahun 2015.
3. Membandingkan antara capaian realisasi kinerja tahun 2015, tahun 2016 dan target RPJM.

Melalui pendekatan tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam RPJM Tahun 2012 – 2017 terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Uraian terhadap pencapaian kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**1. Perbandingan Target Kinerja (Rencana Kinerja) dan Realisasi Kinerja Tahun 2016.****TUJUAN I : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERBUDAYA, BERSIH, DAN BERWIBAWA****Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya implimentasi tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, dan integritas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP		
2	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	B		
3	Nilai Laporan EKPPD	Nilai	Tinggi		

**Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Jumlah Penerimaan PAD	Rp	199.866.989.814,38	186.205.371.551,23	93,16
2	Jumlah Belanja Pemerintah	Rp	2.075.895.536.269,72	1.936.610.401.833,08	93,29
3	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	%	10,24	10,13	98,92
4	Komposisi Belanja Langsung	%	34,60	33,44	96,64

**Sasaran Strategis 3 :**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan	Indeks	93,00	84,80	91,20
2	Rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan	Hari	3	3	100,00
3	Penduduk Wajib Memiliki KTP	%	90,00	85,96	85,96

**Sasaran Strategis 4 :**

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipasif.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Tingkat keselarasan RPKK dengan RPJM Kabupaten	%	85	85	100



2	Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100
3	Jumlah Qanun RDTR Kawasan Perkotaan	Qanun	1	-	-

**Sasaran Strategis 5 :**

Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam	Kasus	100	91	91
2	Jumlah Penerimaan zakat	Rp	3.000.000.000.-	4.065.967.000,-	140,00

**TUJUAN II : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SECARA BERKELANJUTAN**

**Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,39	9	95,84
2	Angka Melek Huruf (persen)	%	99,06	97,50	98,42



3	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	a) SD/Sederajat	%	100	94,94	94,94
	b) SMP/Sederajat	%	98	104,67	106,80
	c) SMA/Sederajat	%	95	75,41	79,37
4	Angka Kelulusan				
	a) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00
	b) SMP/MTS	%	100,00	100,00	100,00
	c) SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100,00
5	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	a) SD/Sederajat	%	97	84,95	87,57
	b) SMP/Sederajat	%	82	82,70	100,85
	c) SMA/Sederajat	%	80	60,60	75,75
6	Rasio Guru Murid				
	a) SD/MI	Rasio	1 : 30	1 : 09	1 : 09
	b) SMP/MTs	Rasio	1 : 27	1 : 08	1 : 08
	c) SMA/MA	Rasio	1 : 30	1 : 09	1 : 09

### Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Angka Prevalensi Gizi Buruk Pada Anak	%	0,20	0,04	500,00
2	Angka Harapan Hidup	%	70,38	72,51	103,02
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Orang	50	12	416,66
4	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Bayi	16	12,10	75,65
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	%	97,50	91,15	93,48





6	Cakupan Pelayanan Imunisasi	%	87,00	87,10	100,11
7	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00
8	Rasio posyandu per 1,000 balita	%	17,72	22,35	126,12

**TUJUAN III : MENUMBUH KEMBANGKAN DAN MENGUATKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.**

**Sasaran Strategis 1 :**

Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 14,85 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Angka Kemiskinan Penduduk	%	15,55	16,94	91,79
2	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	%	3,55	3,70	104,22
3	Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,71	69,77	100,08

**Sasaran Strategis 2 :**

Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Produktivitas Padi	Ton/Ha	7,50	6,63	84,26
2	Ketersediaan pangan utama	%	12,35	11,60	93,92
3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	106	106	100
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK)				
	- Tanaman Pangan dan Holtikultura	%	-	12,12	-
	- Peternakan	%	-	4,92	-
	- Perkebunan	%	-	3,83	-
	- Perikanan	%	3,75	8,13	120,00

**Sasaran Strategis 3 :**

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	32.079	27.809	86,68
2	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (ADHK)	%	5,00	4,85	97
3	Luas Areal Budi Daya	Ha	5,15	4,94	95,92
4	Jumlah Rata-Rata Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	42,30	42,50	100,47

**Sasaran Strategis 4 :**

Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK)	%	32,50	34,50	106,15
2	Jumlah UMKM	Unit	6.400	6.400	100,00
3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK)	%	2,00	1,61*	80,50
4	Jumlah Koperasi yang aktif/ Sehat	Unit	189	189	100,00

\* Data BPS Kab. Bireuen Tahun 2015

**Sasaran Strategis 5 :**

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Kualitas dan jaringan infrastruktur				
	a) Jalan Kabupaten	%	64,07	39,05	60,94
	b) Jembatan	%	85	88,15	103,70
2	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	41,21	34,61	83,98
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,249	0,106	42,57
4	Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	195	195	100,00

**Sasaran Strategis 6 :**

Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Cakupan Penanganan Sampah	%	75,00	75,00	100,00
2	Tingkat Pemantauan Lingkungan Hidup	%	30,00	30,00	100,00
3	Tingkat Penanganan Bencana	%	60,00	60,00	100,00

**TUJUAN IV : MENGUATKAN PERSATUAN DAN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN BERDASARKAN UUPA****Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Jumlah kasus yang mengganggu keamanan dan perdamaian	Kasus	150	50	33,33

**Sasaran Strategis 2 :**

Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Persentase pertemuan /rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda)	%	100	100	100,00

**Sasaran Strategis 3 :**

Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Persentase penyelesaian tindak pidana	%	30	-	-

**Sasaran Strategis 4 :**

Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Nilai capaian %
1	Partisipasi lembaga adat dalam perencanaan pembangunan daerah.	%	100,00	100,00	100,00

## 2. Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun 2016

### TUJUAN 1 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ISLAMI, BERBUDAYA, BERSIH, DAN BERWIBAWA

#### Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya implimentasi tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, dan integritas.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	-	-
Nilai Laporan Kinerja Pemerintah	Nilai	B	C	C	B	-	-
Nilai EKPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	100,00	Tinggi	-	-



**Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya Kapasitas Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Penerimaan PAD	Rp	167.255.638.456,00	173.972.782.734,16	104,02	199.866.989.814,38	186.205.371.551,23	93,16
Jumlah Belanja Pemerintah	Rp	1.741.136.818.350,01	1.607.649.017.634,41	93,33	2.075.895.536.269,72	1.936.610.401.833,08	93,29
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	10,00	100,00	10,24	10,13	98,92
Komposisi Belanja Langsung	%	40,00	39,60	99,00	34,60	33,44	96,64



**Sasaran Strategis 3 :**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan	Indeks	85,00	85.14	100.17	85,00	85,00	100,00
Rata-rata proses perizinan yang cepat, tepat, dan transparan	Hari	5	5	100,00	3	3	100,00
Penduduk Wajib Memiliki KTP	%	83,00	130,18	156,84	90,00	85.96	95,51

**Sasaran Strategis 4 :**

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipatif.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat keselarasan RKPK dengan RPJM Kabupaten	%	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00
Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Qanun RDTR Kawasan Perkotaan	Qanun	2	1	50,00	1	-	-

**Sasaran Strategis 5 :**

Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam	Kasus	150	20	13.33	100	91	91,00





Jumlah Penerimaan zakat	Rp. (Milyar)	3,00	3,07	102,32	3,00	4,06	140,00
Muzakarah Ulama	kali	2	2	100,00	1	1	100,00

**TUJUAN II: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SECARA BERKELANJUTAN**

**Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,36	9,42	100,42	9,39	9,00	95,84
Angka Melek Huruf	%	98,92	99,00	100,89	99,06	97,50	98,42
Angka Partisipasi Kasar (APK)							
a. SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	94,94	94,94
b. SMP/MTs	%	96,00	100,00	104,16	98,00	104,67	106,80
c. SMA/SMK	%	90,00	54,65	64,29	95,00	75,41	79,37
Angka Kelulusan							
a. SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. SMP/MTS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. SMA/SMK/M	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Angka Partisipasi Murni (APM)							
a. SD/MI	%	98,00	98,34	100,34	97,00	84,95	85,57
b. SMP/MTs	%	86,00	89,23	103,75	82,00	82,70	100,85
c. SMK/MA	%	85,00	54,66	64,30	80,00	60,60	75,75
Rasio Guru Murid							
a. SD/MI	Rasio	1 : 27	1 : 15	55,56	1 : 30	1 : 09	30,00
b. SMP/MTs	Rasio	1 : 24	1 : 12	50,00	1 : 27	1 : 08	29,62
c. SMA/MA	Rasio	1 : 25	1 : 13	52,00	1 : 30	1 : 09	30,00



**Sasaran Strategis 2:**

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Prevalensi Gizi Buruk Pada Anak	%	0,3	0,1	33,33	0,20	0,04	500,00
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,51	72,50	99,98	70,38	72,51	103,02
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Orang	75	11	14,66	50	12	416,66
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Bayi	5	16	320,00	16	12,10	75,62
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	%	90,00	89,64	99,60	97,50	91,15	93,48
Cakupan Pelayanan Imunisasi	%	85,00	70,00	82,35	87,00	87,10	100,11
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rasio posyandu per 1,000 balita	%	18,11	17,50	96,63	17,72	22,35	126,12



**TUJUAN III: MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MENGUATKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING SECARA BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

**Sasaran Strategis 1:**

Menurnnya tingkat kemiskinan menjadi 14,85 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka Kemiskinan penduduk	%	19,06	16,94	88,88	15,55	16,94	91,79
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	%	5,55	2,44	43,96	3,55	3,70	104,22
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,61	68,71	93,34	69,71	69,77	100,08

**Sasaran Strategis 2:**

Terlaksananya revitalisasi pertanian yang didukung pengembangan komoditas unggulan sesuai potensi dan karakteristik wilayah.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Produktivitas Padi	Ton/Ha	7,00	6,26	89,42	7,50	6,63	84,26
Ketersediaan pangan utama	Ha	-	-	-	12,35	11,60	93,92
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	-	-	-	106	106	100,00
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK). Tanaman Pangan dan Holtikultura	%	-	-	-	-	12,12	-
- peternakan	%	-	-	-	-	4,92	-
- Perkebunan	%	3,75	4,50	120,00	33,50	3,83	-
- Perikanan	%	4,50	8,10	180,00	5,50	8,13	120,00

**Sasaran Strategis 3:**

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	32.595	28.686	88,00	32.079	27.809	86,68
Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB (ADHK)	%	4,50	8,10	180,00	5,00	4,85	97,00
Luas Areal Budi Daya	Ha	5.100	5.065,67	99,31	515	4.945	960,19
Jumlah Rata-Rata Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	42,30	42,50	98,10	42,30	42,50	100,47

**Sasaran Strategis 4:**

Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kontribusi sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK)	%	33,66	33,66	100,00	32,50	34,50	106,15
Jumlah UMKM	Unit	9.600	9.600	100,00	6.400	6.400	100,00
Kontribusi sub Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK)	%	1,34	1,34	100,00	2,00	1,61	80,50
Jumlah Koperasi yang aktif/ Sehat	Unit	184	184	100,00	189	189	100,00

**Sasaran Strategis 5:**

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kondisi dan Jaringan Infrastruktur							
a. Jalan Kabupaten	Meter	56.275	48.569	86,30	64.070	39.050	60,94
b. Jembatan	%	85,00	85,00	100,00	85,00	88,15	103,70
Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	45,04	54,41	120,00	48,94	41,21	84,20
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,251	0,251	100,00	0,249	0,106	42,57
pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	365	176	48,21	195	195	100,00

**Sasaran Strategis 6:**

Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan Penanganan Sampah	%	30,00	-	-	75,00	75,00	100,00
Tingkat Pemantauan Lingkungan Hidup	%	30,00	-	-	30,00	30,00	100,00
Tingkat Penanganan Bencana	%	40,00	50,00	125,00	60,00	60,00	100,00

**TUJUAN IV: MENGUATKAN PERSATUAN DAN KEBERLANJUTAN PERDAMAIAN BERDASARKAN UUPA****Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan perdamaian

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah kasus yang mengganggu keamanan dan perdamaian	Kasus	65	-	-	150	50	33,33

**Sasaran Strategis 2:**

Terbangunnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase pertemuan/rapat forum komunikasi pimpinan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Sasaran Strategis 3:**

Terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	%	30,00	30,00	100,00	30,00	-	-

**Sasaran Strategis 4:**

Meningkatnya eksistensi kelembagaan adat dalam mendukung perdamaian dan berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Partisipasi lembaga adat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	%	65,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah.**

**a. Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih, dan Berwibawa.**

Pada misi tersebut di atas ditetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Islami, Berbudaya, Bersih dan Berwibawa dengan 5 (lima) sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**TUJUAN 1 :**

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Islami, Berbudaya, Bersih dan Berwibawa

**Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	-	-	WTP	-
2. Penilaian Laporan Kinerja (LKIP) Pemerintah	Nilai	B	-	-	-	-



3.	Laporan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah	Nilai	Tinggi	-	-	-	-
----	--	-------	--------	---	---	---	---

**Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Jumlah Penerimaan PAD	Rp. (milyar)	199,867	186.205	93,16	-	-
2.	Jumlah Belanja Pemerintah	Rp. (milyar)	2.075,89	1.936.61	93,29	-	-
3.	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	%	10,24	10,13	98,92	-	-
4.	Komposisi Belanja Langsung	%	34,60	33,44	96,64	-	-

**Sasaran Strategis 3 :**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah.	Indeks	85	85	100	95	89,47
2.	Rata-rata lama proses pelayanan perizinan	Hari	3	3	100	3	100
3.	Penduduk Wajib Memiliki KTP	%	90	85,96	85,96	95,00	90,48



**Sasaran Strategis 4 :**

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipatif.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Tingkat Keselarasan RKPK dengan RPJM Kabupaten	%	85	85	100	95	105,26
2. Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
3. Jumlah Qanun RDTR kawasan perkotaan	Qanun	1	-	-	1	-

**Sasaran Strategis 5 :**

Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam	Kasus	50	50	100,00	50	100,00
2. Jumlah Penerimaan zakat	Rp. (milyar)	3,00	4,07	101,64	-	-
3. Muzakarah Ulama	Kali	1	1	100,00	-	-



**b. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.**

Misi tersebut di atas mempunyai tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkelanjutan dengan 2 (dua) sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

**TUJUAN:**

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkelanjutan

**Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,39	9,00	95,84	9,42	95,54
2. Angka Melek Huruf (persen)	%	99,06	97,50	98,42	99,20	97,98
3. Angka Partisipasi Kasar (APK)						
a. SD/Sederajat	%	100	94,94	94,94	100	94,94
b. SMP/Sederajat	%	98	104,67	106,80	100	104,67
c. SMA/Sederajat	%	95	75,41	79,37	100	75,41
4. Angka Kelulusan						
a. SD/MI	%	100	100	100	100	100
b. SMP/MTS	%	100	100	100	100	100
c. SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100
5. Angka Partisipasi Murni (APM)						
a. SD/Sederajat	%	97	84,95	87,57	100,00	84,95
b. SMP/Sederajat	%	82	82,70	100,85	96,00	86,14
c. SMA/Sederajat	%	80	60,60	75,75	95,00	63,78
6. Rasio Guru Murid						
a. SD/MI	Rasio	1 : 30	1 : 09	30,00	1:30	30,00
b. SMP/MTs	Rasio	1 : 27	1 : 08	29,62	1:30	29,62
c. SMA/MA	Rasio	1 : 30	1 : 09	30,00	1:30	30,00

**Sasaran Strategis 2 :**

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Angka Prevalensi Gizi Buruk Pada Anak	%	0,20	0,04	500,00	0,20	100,00
2. Angka Harapan Hidup	Tahun	70,38	72,51	103,02	70,39	103,01
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Ibu	50	12	416,66	25	208,33
4. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Bayi	16	12,1	75,62	15	80,66
5. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	%	97,50	91,15	93,48	98	93,01
6. Cakupan Pelayanan Imunisasi	%	87,10	87,10	100,00	90	96,66
7. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8. Rasio posyandu per 10,000 balita	%	17,72	22,35	126,12	17,82	79,73

**c. MISI 3 : Memberdayakan Ekonomi Berdaya Saing Secara Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal**

Misi tersebut di atas bertujuan Menumbuh Kembangkan dan Memperkuat Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :



**TUJUAN :**

Menumbuh Kembangkan dan Memperkuat Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing Secara Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal

**Sasaran Strategis 1 :**

Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 14,85 Persen Dari Jumlah Penduduk Pada Akhir Tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Angka Kemiskinan Penduduk	%	15,55	16,94	91,79	14,85	87,66
2. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	%	3,55	3,70	104,22	3,71	99,73
3. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,71	69,77	100,08	70,23	99,34

**Sasaran Strategis 2 :**

Terlaksananya Revitalisasi Pertanian Yang Didukung Pengembangan Komoditas Unggulan Sesuai Potensi Dan Karakteristik Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Produktivitas Padi	Ton/ Ha	7,50	6,63	84,26	8,00	82,88
2. Ketersediaan pangan utama	%	12,35	11,60	93,92	14,95	77,60
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	106	106	100	200	53,00
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB						



(ADHK).							
- Tanaman Pangan dan Holtikultura	%	-	12,12	-	-	-	-
- Peternakan	%	-	4,92	-	-	-	-
- Perkebunan	%	-	3,83	-	5,00	-	-
Perikanan	%	3,75	8,13	120,00	7,00	81,81	

### Sasaran Strategis 3 :

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah Produksi Perikanan	Ton	32.079	27.809	86,68	38.712	72,00
2. Kontribusi Sektor sub sektor Perikanan Terhadap PDRB (ADHK).	%	5,00	4,85	97	5,50	88,18
3. Luas Areal Budi Daya	Ha	5,15	4,94	95,92	5,25	94,09
4. Jumlah Rata-Rata Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita / Tahun	42,30	42,50	100,47	42,70	99,53

### Sasaran Strategis 4 :

Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK).	%	32,50	34,50	106,15	34,00	101,47



2.	Jumlah UMKM	Unit	6400	6400	100	2088	307,00
3.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK)	%	2.00	2,00	100	3,50	57,14
4.	Jumlah Koperasi yang aktif/ Sehat	Unit	189	189	100	260	73,00

**Sasaran Strategis 5 :**

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Kualitas dan jaringan infrastruktur dengan kondisi baik ;						
	- Jalan Kabupaten	%	64,07	39,05	60,94	70,07	56,00
	- Jembatan	%	85,00	88,15	103,70	100	88,15
2.	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	48,94	41,21	84,20	53,70	77,00
3.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,249	0,106	42,57	24,85	43,00
4.	pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	195	195	100,00	1.966	100,00

**Sasaran Strategis 6 :**

Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7

1.	Cakupan Penanganan Sampah	%	75,00	75,00	100,00	80,00	100,00
2.	Tingkat Pemantauan Lingkungan Hidup	%	30,00	30,00	100,00	35,00	100,00
3.	Tingkat Penanganan Bencana	%	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00

**d. MISI 4 : Mewujudkan Persatuan Dan Keberlanjutan Perdamaian Berdasarkan UUPA**

Pada misi ke 4 tersebut di atas, untuk mencapai tujuan maka dijabarkan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan indikator kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

**TUJUAN :**

Mengukatkan Persatuan dan Keberlanjutan Perdamaian Berdasarkan UUPA

**Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Keamanan Dan Perdamaian

	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah kasus yang mengganggu keamanan dan perdamaian.	Kasus	150	50	50	14,85	-

**Sasaran Strategis 2 :**

Terbangunnya Kerjasama Lintas Sektor dalam Menjaga Keamanan dan Perdamaian

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Persentase Pertemuan/Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	%	100	100	100	-	-

**Sasaran Strategis 3 :**

Terwujudnya Supremasi Hukum yang Berkeadilan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Persentase penyelesaian tindak pidana	%	30	30	100	-	-

**Sasaran Strategis 4 :**

Meningkatnya Eksistensi Kelembagaan Adat dalam Mendukung Perdamaian dan Berperan Strategis dalam Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Partisipasi lembaga adat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	%	100	100	100	-	-



#### 4. Analisa Capaian Kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Bireuen merupakan komitmen bersama sebagai upaya perencanaan yang sistematis guna pencapaian tujuan pembangunan dalam jangka menengah lima tahunan. Upaya pencapaian dimaksud melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan.

Sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Bireuen yaitu “Kabupaten Bireuen yang Bermartabat dan Mandiri Berlandaskan UUPA” dan 4 (empat) misi sebagaimana telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, maka penjabaran tujuan pembangunan daerah akan menajamkan arah pembangunan sehingga penentuan sasaran strategis menjadi hal penting dalam pencapaian hasil pembangunan.

Berdasarkan sasaran strategis melalui indikator yang tersedia maka dapat diuraikan capaian kinerja yang dicapai sebagai berikut.

##### **Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang Islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	-	-	WTP	-
2. Penilaian Laporan Kinerja (LKIP) Pemerintah	Nilai	B	-	-	-	-
3. Laporan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah	Nilai	Tinggi	-	-	-	-
Rata- Rata Capaian Kinerja						-



Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan yang islami, bersih, dan berwibawa yang didukung terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel dan integritas diindikasikan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 belum diketahui karena masih dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/21AA.05/2017 Tanggal 17 Januari 2017, Pemerintah Kabupaten Bireuen mendapat nilai 47,29 atau dengan predikat katagori “C”, terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai 46,96. Peningkatan nilai yang didapat masih belum signifikan sehingga diperlukan beberapa upaya guna mencapai nilai yang lebih baik lagi diantaranya komitmen untuk memperbaiki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen, belajar dan memperdalam pengetahuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melakukan pembenahan dalam tahapan penyusunan LKIP agar lebih sistematis dan terintegrasi dan meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) termasuk dengan instansi atau institusi terkait.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diperoleh dari penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas LPPD Kabupaten Bireuen tahun 2015 Nomor LHE.710/073/IA-LHE/ 2016 tanggal 31 Oktober 2016 dengan peringkat ke 20 dengan nilai atau skor 2,6572 atau dengan katagori prestasi tinggi dan pada tahun 2016 ditargetkan juga dengan nilai tinggi.



### Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah dan mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Jumlah Penerimaan PAD	Rp. (milyar)	199,867	186.205	93,16	-	-
2.	Jumlah Belanja Pemerintah	Rp. (milyar)	2.075,89	1.936.61	93,29	-	-
3.	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	%	10,24	10,13	98,92		
4.	Komposisi Belanja Langsung	%	34,60	33,44	96,64		
Rata- Rata Capaian Kinerja						-	

Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah dalam Menunjang Pembangunan Daerah dan Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal di tandai dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penerimaan PAD dan Jumlah Belanja Pemerintah.

### Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pemerintah.	Indeks	85	85	100	95	89,47



2.	Rata-rata lama proses pelayanan perizinan	Hari	3	3	100	3	100
3.	Penduduk Wajib Memiliki KTP	%	90	85,96	95,51	95,00	90,48
Rata- Rata Capaian Kinerja							<b>93.32</b>

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Didukung Manajemen Pelayanan yang Profesional, SDM Aparatur Berintegritas dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal diindikasikan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 93,32 persen terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 93,31 persen dengan katagori sangat berhasil.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 85 persen, terealisasi sebesar 85 persen dengan tingkat capaian kinerja 100 persen, bila dibandingkan capaian tahun 2016 terhadap capaian akhir RPJM 2017 nilai indek sebesar 89,47 persen. Nilai IKM tersebut dilaksanakan dengan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) menetapkan target penyelesaian administrasi perizinan rata-rata selama 3 hari, hal tersebut berhasil direalisasikan seperti target yang telah ditetapkan. Rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses pelayanan perizinan pada tahun 2016 ditargetkan selama 3 hari dan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 3 hari sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJM 2017 capaian kinerja juga mencapai 100 persen.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) target yang telah ditetapkan sebesar 90,00 persen, terealisasi 85,96 persen dengan tingkat capaian 95,51 persen sedangkan Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 90,48 persen.

Pada tahun 2016 penetapan target Kartu Tanda Penduduk sebanyak 18.500, terpakai sebanyak 15.902 lembar, hal ini dikarenakan sejak oktober 2016 sampai

saat ini tidak tersedianya blanko KTP-EI di Dirjen kependudukan Pusat sehingga dikeluarkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el.

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk di Kabupaten Bireuen hingga tahun 2014 adalah 423.397 jiwa yang terdiri dari 207.664 jiwa laki-laki dan 215.733 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen tahun 2014 mencapai 223 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk pada 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kota Juang dengan kepadatan sebesar 1.533 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Peudada sebesar 67 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengeluarkan/menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil posisi 02 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yang Terbit**  
**Tahun 2015 – 2016**

NO	JENIS DOKUMEN	TAHUN	
		2015	2016
1.	Penerbitan Kartu Keluarga	32.102	30.510
2.	Penerbitan KTP-el	20.647	15.902
3.	Surat Pindah Keluar	3.891	4.453
4.	Surat Pindah Masuk	4.279	3.897
<b>Jumlah Dokumen</b>		<b>60.919</b>	<b>54.762</b>

*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bireun*

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah dokumen yang dikeluarkan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Sasaran Strategis 4 :**

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipasif

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Tingkat Keselarasan RKPK dengan RPJM Kabupaten	%	85	85	100	95	89,47
2. Persentase data Statistik dan Informasi Pembangunan yang Akurat dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100
3. Jumlah Qanun RDTR kawasan perkotaan	Qanun	1	-	-	1	-
Rata- Rata Capaian Kinerja						63,16

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Integratif dan Partisipasif terdiri dari 3 (tiga) Indikator kinerja. Indikator kinerja Tingkat keselarasan rencana kerja pemerintah Kabupaten Bireuen ditargetkan pada tahun 2016 sebesar 85 persen , terealisasi sebesar 85 persen tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2017 merupakan tahun kelima pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan melalui Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2014.



**Sasaran Strategis 5:**

Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam	Kasus	50	50	100	50	100
2. Jumlah Penerimaan zakat	Rp. (milyar)	3,00	4,07	101,64	-	-
3. Muzakarah Ulama	Kali	1	1	100	-	-
Rata- Rata Capaian Kinerja						<b>33,33</b>

Sasaran strategis Implementasi Nilai-Nilai Dinul Islam Dalam Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat, terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100,55 persen dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 33,33 persen. Jumlah kasus-kasus pelanggaran syariat islam pada tahun 2016 ditargetkan adalah 50 kasus dan ditenggarai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen sebanyak 50 kasus dengan nilai capaian 100%.

Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Zakat melebihi dari target yang direncanakan sebesar adalah 101,64 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Bireuen sadar akan kewajibannya akan penerapan syariat islam.

Selain mengelola dana zakat, Baitul Mal juga mengelola dana infaq yang bersumber dari pendapatan pegawai sebesar 1% dari penghasilan para pegawai yang tidak terkena zakat. Jumlah dana infaq yang terkumpul pada Tahap I (Januari s/d April 2015) adalah sebesar Rp. 1.518.616.000,- (satu milyar lima ratus delapan



belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah), Tahap II (Mei s/d Agustus 2015) sebesar Rp. 1.421.020.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dan Tahap III (September s/d Desember) sebesar Rp. 1.234.800.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Total jumlah penerimaan dana infaq tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.174.436.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Sasaran Strategis 6 :**

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terpadu dan berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	9,39	9,00	95,84	9,42	95,54
2. Angka Melek Huruf (persen)	%	99,06	97,50	98,42	99,20	97,98
3. Angka Partisipasi Kasar (APK)						
a) SD/Sederajat	%	100,00	94,94	94,94	100,00	94,94
b) SMP/Sederajat	%	98,00	104,67	106,80	100,00	104,67
c) SMA/Sederajat	%	95,00	75,41	79,37	100,00	75,41
4. Angka Kelulusan						
a) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) SMP/MTS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c) SMA/SMK/MA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Angka Partisipasi Murni (APM)						
a) SD/Sederajat	%	97,00	84,95	87,57	100,00	84,95
b) SMP/Sederajat	%	82,00	82,70	100,85	96,00	86,14
c) SMA/Sederajat	%	80,00	60,60	75,75	95,00	63,78
6. Rasio Guru Murid						
a) SD/MI	Rasio	1 : 30	1 : 09	333,34	1:30	333,34
b) SMP/MTs	Rasio	1 : 27	1 : 08	337,5	1:30	337,5
c) SMA/MA	Rasio	1 : 30	1 : 09	333,34	1:30	333,34
Rata- Rata Capaian Kinerja						<b>136,62</b>





Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan yang Terpadu dan Berkualitas terdiri dari beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 125,90 persen dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 136,62 persen

Indikator kinerja angka rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2016 terealisasi sebesar 9,00 dari target 9,39 persen sehingga capaiannya adalah sebesar 95,84 persen. sedangkan capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 95,54 persen.

Angka rata-rata Lama Sekolah. Lamanya Sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2011-2014 terus mengalami peningkatan, yaitu 8,45 tahun pada tahun 2011 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2014. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh tahun 2011 yaitu sebesar 8,32 tahun, capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen sudah lebih baik. Namun demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sangatlah kecil, dari 8,45 tahun pada tahun 2011 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan hanya 0,13 pertahun.

Indikator angka melek huruf tahun 2016 terealisasi 99,50 dari target 99,06%, sehingga capaiannya adalah sebesar 99,20%. sedangkan capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 97,98%. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang



untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Tinggi rendahnya angka buta huruf suatu masyarakat mencerminkan kualitas masyarakat tersebut.

Pada tahun 2015, nilai indikator AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bireuen mencapai 98,69 persen. Hal ini berarti bahwa sekitar 98 persen penduduk Kabupaten Bireuen yang berumur 15 tahun ke atas sudah bisa membaca-menulis huruf latin dan sebaliknya. Nilai indikator AMH mengalami kenaikan di tahun 2014, akan tetapi persentase AMH menjadi menurun saat tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Bireuen menargetkan AMH dengan capaian sebesar 98,92 persen pada tahun 2015, sedangkan berdasarkan data dari kegiatan sensus 2015 capaian AMH berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bireuen harus lebih menekankan komitmennya kembali dalam upaya pemberantasan buta huruf dan masyarakat pun perlu ikut serta dalam upaya tersebut dengan memberikan pengajaran kepada penduduk disekitar yang masih buta huruf.

APK untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat di Kabupaten Bireuen pada tahun 2015 mencapai 102,82 persen. APK ini meningkat dratis dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi sebesar 9,49 persen dari 93,33 persen di tahun 2014 menjadi 102,82 persen di tahun 2015. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk berusaha meningkatkan daya serap penduduk untuk mengenyam pendidikan SMP/ sederajat telah dikatakan berhasil. Angka kelulusan tahun 2016 ditargetkan sebesar 100 persen teralisasi sebesar 100 persen dengan tingkat capaian 100 persen sedangkan capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 100 persen.



**Sasaran Strategis 7 :**

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Angka Prevalensi Gizi Buruk Pada Anak	%	0,20	0,04	500,00	0,20	500,00
2. Angka Harapan Hidup	Tahun	70,38	72,51	103,02	70,39	103,01
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Ibu	50	12	416,66	25	208,33
4. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Bayi	16	12,1	132,23	15	123,96
5. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	%	97,5	91,15	93,48	98,00	93,01
6. Cakupan Pelayanan Imunisasi	%	87,00	87,1	100,11	90,00	96,66
7. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8. Rasio posyandu per 10,000 balita	%	17,72	22,35	126,12	17,82	125,21
Rata- Rata Capaian Kinerja						<b>156,69</b>

Sasaran Strategis Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 196,45 persen dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 156,69 persen. Angka Prevalensi Gizi Buruk Pada Anak pada tahun 2016, target 0,20 persen, terealisasi 0,04 persen sehingga. Capaiannya tahun 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 500 persen.

Angka Usia Harapan Hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup sejak lahir sampai meninggal. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen adalah 72,51 tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat juga akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tahun 2016 sebanyak 12 ibu dari perkiraan awal sebanyak 50 ibu. Angka kematian bayi tahun 2016 berjumlah 12,1 bayi dari 1.000 kelahiran, angka ini lebih kecil dari perkiraan awal sebanyak 16 bayi.

**Sasaran Strategis 8 :**

Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 14,85 persen dari Jumlah Penduduk pada Akhir Tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Angka Kemiskinan Penduduk	%	15,55	16,94	91,79	14,85	87,66
2. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	%	3,55	3,70	104,22	3,71	99,73
3. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,71	69,77	100,08	70,23	99,34
Rata- Rata Capaian Kinerja						<b>95,58</b>

Sasaran strategis Menurunnya Tingkat Kemiskinan Menjadi 14,85 Persen dari Jumlah Penduduk Pada Akhir Tahun 2017 di indikasikan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 104,44 % dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJM tahun 2017 sebesar 95,58 %. Angka kemiskinan tahun 2016 di targetkan sebesar 15,55 % terealisasi 16,94% tingkat capaian 91,79 persen dan capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJM 2017 adalah sebesar 87,66%.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan, dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir.

Persentase angka kemiskinan Kabupaten Bireuen beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2011 tingkat kemiskinan mencapai 19,06 persen, tahun 2012 menurun menjadi 18,21 persen. Begitu juga dengan tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing turun 17,65 persen dan 16,94 persen. Untuk tahun 2015 tingkat kemiskinan hampir sama dengan tahun sebelumnya sekitar 16,94 persen. Gambaran mengenai perkembangan kemiskinan di kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**. Tabel 3.3**

Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen  
Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	263.593	277.831	292.308	295.294	301.027



Persentase Penduduk Miskin (%)	19,06.	18,21	17,65	16,94	16.94
Jumlah Penduduk Miskin (orang)	76.300	74.300	73.900	72.220	73.140

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen 2016

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Bireuen dapat dilihat berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan nilai PDRB ADHB, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih terus memiliki peran yang paling dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen. Secara absolut nilai tambah produksi sektor pertanian dalam PDRB ADHB terus meningkat selama kurun waktu tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 nilai tambah sektor pertanian masih tercatat sebesar Rp. 2,61 triliun, sementara pada tahun 2015 nilai tambah sektor ini telah tercatat sebesar 3,42 triliun. Hal ini mengidentifikasi bahwa kurun waktu antara tahun 2011–2015, besaran nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB ADHB Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,52 persen per-tahun. Dengan demikian kontribusi sektor pertanian tersebut terhadap pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Bireuen secara keseluruhan sangat stabil, dimana pada tahun 2011 tercatat kontribusinya sebesar 34,05 persen, sedangkan tahun 2015 menjadi 34,06 persen.

Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor selama ini juga cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bireuen. Dalam kurun waktu antara tahun 2011–2015 terlihat bahwa peran dan kontribusi sektor ini terhadap struktur PDRB ADHB Kabupaten Bireuen rata-rata berkisar antara 22,5 persen. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa hampir  $\frac{1}{4}$  bagian dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen selama ini digerakkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya disusul dari sektor transportasi dan pergudangan dengan peranan 10,22 persen, dengan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi yang sama juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi dimana pada tahun 2011 hanya sebesar 8,39 persen dan menjadi 8,54 persen di tahun 2015. Lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial juga cukup besar kontribusinya, pada tahun 2015 mampu menyumbang 7,52 persen. Kondisi lapangan usaha lainnya masing-masing hanya mampu membentuk roda



perekonomian Kabupaten Bireuen di bawah 3 persen di tahun 2015, yang terendah adalah pengadaan air 0,05 persen selanjutnya pengadaan listrik dan produksi es sebesar 0,06 persen. Dalam hal ini kiranya situasi keamanan dan ketentraman serta iklim usaha di daerah ini perlu terus diupayakan agar dapat terus terjaga dengan baik, dimana hal tersebut dapat berimplikasi positif bagi perekonomian masyarakat sehari-hari, maupun perekonomian daerah secara lebih luas. Perkembangan perekonomian Kabupaten Bireuen yang diikuti dengan Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Bireuen salah satunya dapat dilihat daribesaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan per-kapita masyarakat penduduk Kabupaten Bireuen secara umum menunjukkan tren peningkatan. Selama kurun waktu tahun 2011-2015, pertumbuhan pendapatan per-kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,81 persen per-tahun, dan meningkat dengan rata-rata sebesar 1,95 persen per-tahun untuk pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK).

Berdasarkan PDRB ADHB, tercatat pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2011 sebesar Rp.19,16 juta atau naik sebesar 12,38 persen. Demikian halnya tahun 2012 dan 2013, dimana pendapatan per-kapita penduduk ADHB juga mengalami peningkatan yaitu 20,18 juta di tahun 2012 dan 21,28 juta di tahun 2013 23,07 juta selanjutnya untuk tahun 2014 menjadi 22,20 juta dan pada tahun 2015 sebesar 23.07 juta Berdasarkan ADHK, pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Bireuen selama kurun waktu antara 2011-2015 juga menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun dengan nilai absolut dan besaran kenaikan yang lebih rendah dibandingkan perhitungan PDRB ADHB. Hingga tahun 2015, pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Bireuen tercatat sebesar Rp. 23,07 juta, yang meningkat secara rata-rata 1,59 persen per-tahun sejak dari tahun 2011, dimana saat itu nilai pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Bireuen tercatat sebesar RP. 18,17 juta. Gambaran lebih rinci terkait nilai pendapatan per-kapita ADHB dan ADHK penduduk Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tampilan berikut.

**Tabel 3.4**  
PDRB per Kapita Kabupaten Bireuen  
Tahun 2011 – 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1. Atas Dasar Harga Berlaku</b>					
PDRB (Rp.000.000,-)	7.664613, 2	8.245.129,6	8.878.331,0	9.397.500,3	10.040.488, 4
Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	398.201	406.083	413.817	423.397	435.300
PDRB per Kapita (Rp.000,-)	19.160,2	20.178,6	21.276,2	22.195,5	23.065,7
<b>2. Atas Dasar Harga Konstan</b>					
PDRB (Rp.000.000,-)	7.397.629,9	7.689.706,3	7.999.503,7	8.171.310,7	8,473.559,8
Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa)	398,201	406,083	413,817	423.397	435.300
PDRB per Kapita (Rp.000,-)	18.429,8	18.819,3	19.170,2	19.299,4	19.466.0

**Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2016**

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh Badan Statistik Kabupaten Bireuen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bireuen pada bulan Agustus 2015 tercatat sebesar 11,02 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 11 orang yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja atau menganggur. Angkatan ini mengalami kenaikan sebesar 2 persen dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2014 dimana TPT nya sebesar 9,02 persen. Hal ini disebabkan oleh daya serap yang menurun khususnya di sector Kuonstruksi dan jasa kemasyarakatan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pengguran terbuka perempuan melebihi besar dengan TPT laki-laki. TPT perempuan pada bulan agustus 2015 sebesar 11,76 persen sedangkan TPT laki-laki sebesar





10,52 persen. Hal ini dapat diartikan di pasar tenaga kerja lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki dibanding dengan perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, baik pengangguran laki-laki maupun perempuan didominasi oleh tingkat pendidikan SMA sebesar 66,80 persen. Hal ini menunjukkan kenaikan bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Bireuen sudah semakin baik, akan tetap berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga pengangguran tamatan SMA dari tahu ke tahun semakin bertambah.

Apabila dibanding dengan keadaan pada tahun lalu, yaitu pada periode agustus 2014, hampir semua TPT pada semua tingkat pendidikan mengalami trend peningkatan kecuali pada tingkat pendidikan dibawah SD ( tidak tamat SD, tidak sekolah) dan SMP sederajat. Pendidikan dibawah SD dari 20,15 persen pada agustus 2014 menjadi 6,00 persen pada agustus 2015. Dan pendidikan SMP/ sederajat dari 20,31 persen pada agustus 2014 menjadi 7,17 persen pada agustus 2015 Hal ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Bireuen masih belum banyak menumbuhkan tenaga ahli dengan lulusan perguruan tinggi. Karena pasar kerja yang menumbuhkan pekerjaan tamatan perguruan tinggi yang disatukan kerja perangkat kabupaten saja, selain itu pasar tenaga kerja di Kabupaten Bireuen lebih banyak tersedia untuk pekerja tamatan SMP ke bawah. Sebaliknya, jika dilihat di data Agustus 2014 terjadi penurunan TPT pada tingkat perguruan tinggi dibanding pada Agustus 2013 sebesar 22,53 yang cukup besar yaitu 9 persen. Dimana TPT pada Agustus 2013 sebesar 22,53 persen menjadi 13,58 persen di Agustus 2014. Hal ini terjadi karena di tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen menerima calon Pegawai Negeri Sipil secara besar-besaran.

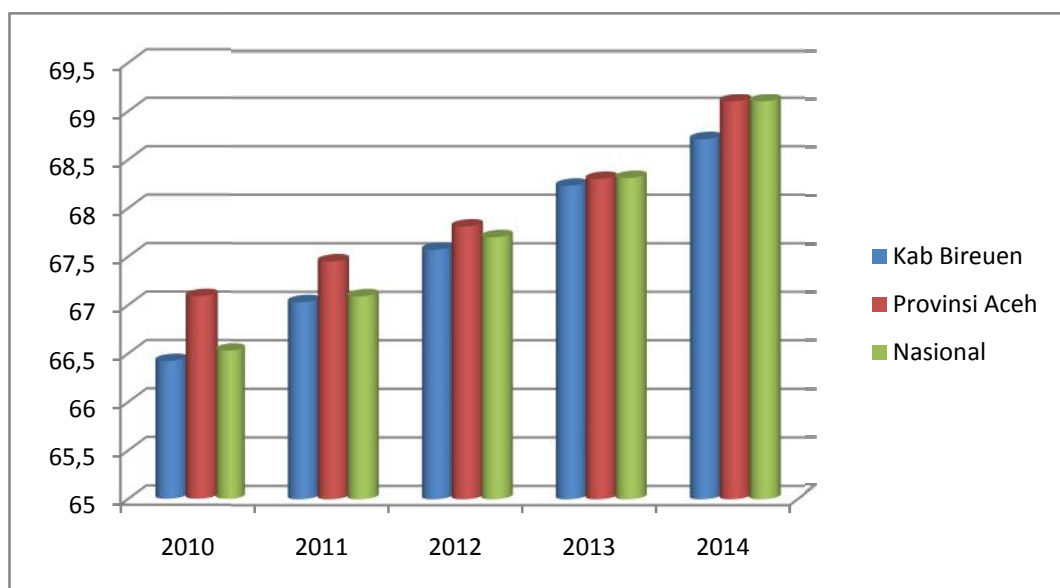
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM juga merupakan gambaran lain dari kondisi terkait kualitas dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 di targetkan 67,71 terealisasi 69,77 dengan tingkat capaian 100,08 sedangkan capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJM sebesar 87,66%.

Pada tahun 2010, angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bireuen tercatat sebesar 66,42. Selanjutnya pada tahun 2011, angka IPM Kabupaten Bireuen meningkat menjadi 67,03, pada tahun 2012 angka IPM tersebut terus meningkat menjadi 67,57, pada tahun 2013 angka IPM Kabupaten Bireuen semakin meningkat menjadi 68,23. Selanjutnya pada tahun 2014 juga semakin mengalami peningkatan menjadi 68,71.

Peningkatan capaian angka IPM tersebut juga menjadi salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam upaya meningkatkan kapasitas dasar masyarakat penduduk daerahnya, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang tentu nantinya akan dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah secara lebih luas. Gambaran terkait capaian IPM Kabupaten Bireuen serta perbandingannya dengan angka IPM Provinsi Aceh dan IPM secara Nasional dapat dilihat pada tampilan grafik berikut ini:

### Grafik

#### IPM Kabupaten Bireun, Pemerintah Aceh dan Nasional Tahun 2010 – 2014



Sumber : *BPS* Aceh (diolah)



Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Bireuen selama kurun waktu 2010 - 2014 tersebut tergolong dalam kategori capaian menengah ke atas. Secara rata-rata, angka IPM Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir tersebut terlihat masih berada diatas nilai rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) tingkat Provinsi Aceh maupun secara nasional. Berdasarkan perolehan angka IPM Kabupaten Bireuen pada tahun 2014, daerah ini menempati peringkat ke-9 dari 23 kabupaten/kota yang ada di seluruh Provinsi Aceh. Capaian tersebut merupakan suatu hal yang memang dirasa belum cukup menggembirakan. Namun demikian tentunya harus terus diperlukan berbagai upaya, terobosan dan inovasi program pembangunan ke depan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar supaya capaian angka IPM tersebut dimasa yang akan datang dapat terus ditingkatkan lebih baik lagi.

**Sasaran Strategis 9 :**

Terlaksananya Revitalisasi Pertanian yang Didukung Pengembangan Komoditas Unggulan Sesuai Potensi dan Karakteristik Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Produktivitas Padi	Ton/Ha	7,50	6,63	84,26	8,00	82,88
2. Ketersediaan pangan utama	%	12,35	11,60	93,92	14,95	77,60
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	106	106	100	200	53,00
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK)*.						
- Tanaman Pangan & Holtikultura	%	-	12,12	-	-	-
- Peternakan	%	-	4,92	-	-	-
- Perkebunan	%	-	3,83	-	-	-
- Perikanan	%	3,75	8,13	216,08	5,50	147,81
Rata- Rata Capaian Kinerja						<b>90,32</b>

\* BPS Kab. Bireuen Data tahun 2015



Sasaran strategis Terlaksananya Revitalisasi Pertanian yang Didukung Pengembangan Komuditas Unggulan Sesuai Potensi dan Karakteristik Wilayah terdiri dari 4 ( empat ) Indikator kinerja. Indikator kinerja yang pertama yaitu produktivitas padi target tahun 2016 sejumlah 7,50 ton per tahun terealisasi sejumlah 6,64 ton per tahun tingkat capaian sejumlah 84,26 persen sedangkan capaian tahun 2016 terhadap RPJM sebesar 82,88 persen.

Perkembangan luas panen padi di Kabupaten Bireuen dipengaruhi beberapa faktor antara lain lahan sawah yang diusahakan tanam oleh petani, pengairan, ketersediaan benih pupuk dan kemauan petani padi dalam mengusahakan tanaman padi. Perkembangan luas tanam di Kabupaten Bireuen tahun 2011- 2015 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2012 menurun hingga 15 persen karena adanya kekeringan. Namun terus terjadi peningkatan pertumbuhan luas tanam dari tahun 2013 hingga 2015. Sementara luas panen dapat dilihat pada tabel di bawah ini, meskipun pada tahun 2013 hanya terjadi peningkatan kecil pada luas panen peningkatan tajam. Hal ini menunjukkan bahwa kecilnya kerusakan/puso yang terjadi dan banyaknya sisa tanam dari tahun lalu yang belum di panen. Sebaliknya pada tahun 2014 terjadi peningkatan luas tanam, akan tetapi luas panen menurun dari tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kerusakan irigasi di kecamatan Samalanga dan Jeunieb sehingga banyak tanaman padi yang gagal panen. Sementara di kecamatan Makmur terjadi kekeringan di musim gadu, sehingga banyak tanaman yang tidak dapat dipanen. Luas penanaman baru tanaman padi di Kabupaten Bireuen pada tahun 2015 sebesar 45 529 hektar, terdiri dari luas tanam terdiri dari luas tanam periode Januari-April 9.308 hektar, Mei-Agustus 21.339 dan September-Desember 14.879 hektar. Luas tanam padi yang paling besar berada di kecamatan Simpang Mamplam seluas 4.614 hektar, kemudian disusul oleh Kecamatan Peudada seluas 4.005 hektar.

Produksi padi pada tahun 2015 di Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun 2014. Indikator kinerja ketersediaan pangan utama target tahun 2016 sejumlah 12,35% terealisasi sebesar 11,60% tingkat capaian sebesar 93,92% sedangkan capaian tahun 2016 terhadap RPJM sebesar 77,60%.

**Sasaran Strategis 10 :**

Berkembangnya ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatnya kesejahteraan nelayan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Jumlah Produksi Perikanan	Ton	32.079	27.809	86,68	38.712	72,00
2. Kontribusi Sektor sub sektor Perikanan Terhadap PDRB (ADHK).	%	5,00	4,85	97	5,50	88,18
3. Luas Areal Budi Daya	Ha	5,15	4,94	95,92	5,25	94,09
4. Jumlah Rata-Rata Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	42,30	42,50	100,47	42,70	99,53
<b>Rata- Rata Capaian Kinerja</b>						<b>88,45</b>

Sasaran strategis Berkembangnya Ekonomi Masyarakat Pesisir Dan Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 95% sedangkan capaian tahun 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 88,45%.

Jumlah produksi perikanan target tahun 2016 sejumlah 32.079 terealisasi sejumlah 27.809 tingkat capaian sejumlah 86,68 % sedangkan capaian tahun 2016 terhadap RPJM sebesar 72%. Perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Bireuen. Aktivitas di sektor ini terkonsentrasi dalam bentuk perikanan tangkap dan budidaya. Untuk perikanan tangkap, aktivitas produksinya melingkupi 10 (sepuluh) Kecamatan dengan sentra produksi perikanan tangkap antara lain Jangka, Samalanga, Peudada dan Jeunieb. Nelayan di daerah ini terkonsentrasi di beberapa kecamatan. Jumlah nelayan yang terbanyak adalah di Kecamatan Simpang Mamplam, Jeumpa, Gandapura, Samalanga, Jeunieb, Jangka, Peudada, dan Peulimbang. Dalam melakukan aktivitasnya, para nelayan menggunakan



sarana penangkapan berupa perahu motor dan perahu tanpa motor. Produksi ikan laut yang dominan antara lain cakalang dengan produksi pada tahun 2015 466,82 ton, tongkol 5.075,18 ton, teri 1.173,95 ton, gembung 756,74 ton, tuna 649,30 ton, tenggiri 211,50 ton, tenggiri papan 126,83 ton, layur 48,57 ton, cucut 44,83 ton, pari 27,53 ton, seriding 59,74 ton, senangin 47,30 ton, kerusi 107,92 ton, biji nangka 140,57 ton, ikan terbang 106,41 ton, julung-julung 16,18 ton, dan lain-lain. Sedangkan untuk budidaya perikanan, udang windu 5.510 ton dan bandeng 4.196 ton tetap menjadi pilihan para petani dan hampir 30% berasal dari kecamatan Jangka.

Kontribusi Sektor sub sektor Perikanan Terhadap PDRB (ADHK). target tahun 2016 sebesar 5.00 terealisasi sebesar 4,85 tingkat capaian sebesar 97 % sedangkan capaian tahun 2016 terhadap RPJM sebesar 88,18%.

Jumlah rata-rata konsumsi ikan target tahun 2016 sebesar 42.30 ton terealisasi sebesar 42,50 ton tingkat capaian sebesar 100,47% sedangkan capaian tahun 2016 terhadap RPJM sebesar 99,53%.

**Sasaran Strategis 11 :**

Berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK).	%	32,50	24,81	76,34	34,00	72,97
2. Jumlah UMKM	Unit	6.400	6.400	100,00	2.088	307,00
3. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK)	%	2,00	1,61	80,50	3,50	46,00
4. Jumlah Koperasi yang aktif/ Sehat	Unit	189	189	100,00	260	73,00
Rata- Rata Capaian Kinerja						<b>124,74</b>



Sasaran Strategis berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa serta meningkatnya kapasitas UMKM berbasis sumber daya lokal terdiri dari 4 (empat) Indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran dengan nilai rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 89,21 persen, terhadap pencapaian RPJM tahun 2017 sebesar 124,74 persen.

Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama sebagai pendistribusi atau pemasar berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia barang-barang kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2016 sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen, lebih dari 90 persen pedagang terdiri pedagang kecil. Peningkatan aktivitas perdagangan juga dapat dicermati dari menjamurnya deretan toko-toko atau pusat perbelanjaan kebutuhan masyarakat dalam tahun-tahun terakhir ini. Sedangkan untuk sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Bireuen semakin meningkat. Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.

Indikator kinerja jumlah UMKM ditargetkan tahun 2016 sebanyak 6.400 unit terealisasi sebanyak 6.400 unit dengan tingkat capaian pada tahun 2016 sebesar 100 persen. Peran masyarakat pelaku dunia usaha atau swasta, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai penggerak roda perekonomian di Indonesia secara keseluruhan haruslah diakui masih cukup tangguh, terutama dalam menghadapi terpaan berbagai krisis yang melanda selama ini. Kondisi tersebut pula yang mendorong pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal ini, perlu terus memberikan perhatian bagi pengembangan sektor UMKM yang ada di Kabupaten Bireuen, termasuk dalam kaitannya dengan upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, namun demikian tentunya upaya tersebut tidaklah senantiasa dapat berjalan dengan mudah tanpa hambatan apapun.

Untuk itu diperlukan perhatian dan upaya yang lebih fokus dan terarah dalam melakukan pembinaan terkait pengembangan usaha mikro dan kecil, karena kontribusi kelompok usaha mikro dan kecil selama ini memang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi terpaan krisis, sehingga terus dapat menjadi pilar utama yang menyangga perekonomian daerah di masa mendatang.

Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan, terutama yang dapat menunjang sektor pertanian, upaya ini diharapkan untuk penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis usaha industri yang ada di kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal dan non formal. Usaha-usaha industri kecil/rumah tangga yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan telah beroperasi selama ini antara lain industri bubuk kopi, tepung beras, minyak kelapa, tilam kapuk, anyaman, kopiah, juga bordir. Untuk usaha industri kecil, yang paling banyak ditekuni masyarakat di daerah ini antara lain industri garam rakyat, pembuatan kue kering, minyak kelapa, pembuatan perabot, batu bata, dan pembuatan kosen ketam. Seluruh usaha industri kecil/industri rumah tangga yang ada selama ini menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga kualitas produksinya masih belum memadai. Akibatnya, pemasarannya lebih banyak di pasaran lokal. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah, terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran, namun upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan pendukung ini.

**Sasaran Strategis 12 :**

Meningkatnya kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Kualitas dan jaringan infrastruktur dengan kondisi baik						
- Jalan Kabupaten	%	64,07	39.05	60.94	70.07	56,00
- Jembatan	%	85	88.15	103.70	100	88,15
2. Luas Irigasi Dalam Kondisi	%	48,94	41.21	84,20	53,70	77,00





	Baik .						
3.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0.249	0.106	42.57	24,85	43,00
4.	Pembangunan Rumah Layak Huni	Unit	195	195	100	1966	10,00
Rata- Rata Capaian Kinerja							<b>54,83</b>

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat” tersebut terdiri dari 4 (empat ) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 36,84 persen dan Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 54,83 persen.

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, yakni untuk kondisi baik/sedang tingkat kerusakannya kurang dari 10 persen, untuk kondisi sedang tingkat kerusakannya 10 – 16 persen, untuk kondisi rusak yaitu tingkat kerusakannya 16 - 20 persen, sedangkan untuk kondisi jalan rusak berat tingkat kerusakannya diatas 20 persen.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di halaman berikut.

**Tabel 3.5**  
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi  
Tahun 2011 s.d 2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Status/Kelas Jalan</b>							
1	Jalan Nasional	Km	72,8	105,8	105,8	105,8	105,80
2	Jalan Provinsi	Km	35,8	2,8	2,8	2,8	3,80
3	Jalan Kabupaten	Km	876,8	876,8	875,6	878,0	891,9



Jenis Permukaan Jalan Kabupaten							
1	Aspal	Km	406,4	424,3	485,7	497,1	503,16
2	Kerikil/Pengerasan	Km	264,2	252,5	190,6	228,9	241,69
3	Tanah	Km	206,2	200,0	199,3	149,6	145,06

Kondisi Jalan Kabupaten							
1	Baik	Km	198,6	220,4	291,5	288,6	384,92
2	Sedang	Km	292,1	283,1	280,9	268,2	233,51
3	Rusak Ringan	Km	98,0	93,1	123,07	135,7	119,7
4	Rusak Berat	Km	288,1	280,1	180,08	185,3	153,78

Sumber : Dinas BMCK Kab.Bireuen, 2016

Dari tabel tersebut diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir, panjang ruas jalan dengan kondisi baik di wilayah Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat 198,6 Km atau hanya 22,65 persen ruas jalan kabupaten yang tergolong dalam kondisi baik. Pada tahun 2015 ruas jalan Kabupaten dengan kondisi baik telah meningkat menjadi 384,92 Km atau mencapai 33,29 persen dari total ruas jalan yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari gambaran data pada tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi kualitas maupun kuantitas sarana jalan yang ada di Kabupaten Bireuen masih perlu terus ditingkatkan, dimana dari keseluruhan total panjang ruas jalan kabupaten 876,8 Km, sepanjang 268,2 persen atau sekitar 30,59 persen diantaranya masih termasuk dalam kategori jalan yang tergolong dalam kondisi sedang, bahkan sepanjang 185,3 Km atau sekitar 21,13 persen jalan di daerah ini masih tergolong dalam kondisi rusak berat.

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi  
Kabupaten Bireuen Tahun 2011-2015

Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jlh. Penumpang Angk. Darat	Orang	129.815	130.322	127.563	129.880	129.320
Jlh. Angkutan Umum	Unit	184	154	3477	3477	3400
Jumlah Terminal Bis	Unit	4	4	5	5	5

Sumber : Dishubkominfo Kab. Bireuen, 2016

Tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi.

Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah ini karena mengingat pentingnya peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung serta keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat, agar dapat meningkat lebih baik lagi dimasa mendatang.

Aspek lain yang dinilai ikut mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah kualitas lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Keberadaan sistem sanitasi yang baik ikut mendukung pengelolaan limbah rumah tangga yang jika tidak diperhatikan dengan baik justru dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Gambaran terkait sejumlah aspek yang berhubungan dengan kualitas lingkungan tempat tinggal atau pemukiman penduduk di Kabupaten Bireuen, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
Kualitas Pemukiman Penduduk  
Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2015 (Persen)

Uraian	2012	2013	2014	2015
Rumah Bersanitasi	36.286	37.361	56.547	53.232
Rumah Sehat/Layak Huni	21.503	27.297	66.577	55.663
Jumlah Rumah (unit)	88.974	89.832	94.308	88.862
Persentase Rumah Bersanitasi (%)	63,20	77,46	71,10	71,92
Persentase Rumah Layak Huni (%)	57,03	57,65	70,60	62,65
Lingkungan Pemukiman Kumuh (Ha)	n.a	n.a	n.a	264,99

Sumber : Dinkes, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2015 yang lalu masih terdapat 264,99 ha kawasan pemukiman ataupun tempat tinggal masyarakat/penduduk di Kabupaten Bireuen yang masih tergolong dalam kawasan pemukiman kumuh atau yang belum sesuai dengan standar hidup sehat. Bahkan lebih memprihatinkan lagi apabila dilihat berdasarkan jumlah rumah yang termasuk kategori rumah layak huni, dimana data pada tabel tadi menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari total 88.862 rumah yang ada di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan, baru sebanyak 55.663 atau baru sekitar 62,65 persen yang sudah tergolong dalam kualifikasi rumah layak huni. Kondisi tersebut kiranya juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bireuen yang merencanakan rehabilitasi rumah agar layak huni, terkait dengan perencanaan program dan hubungannya dengan rencana Pemerintah Provinsi Aceh melaksanakan program bantuan bagi rumah dhuafa, kiranya perlu ditindak lanjuti dengan melakukan pendataan dan pengusulan secara bertahap untuk mendapat pembiayaan dari pemerintah provinsi, sehingga diharapkan hingga akhir periode pembangunan jangka menengah ini di tahun 2017 nanti, tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bireuen yang masih harus tinggal atau menempati rumah yang tidak sehat/layak huni.

**Sasaran Strategis 13 :**

Terciptanya kelestarian lingkungan dan pengelolaan kebencanaan yang terpadu

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Cakupan Penanganan Sampah	%	75,00	75,00	100,00	80,00	100,00
2. Tingkat Pemantauan Lingkungan Hidup	%	30,00	30,00	100,00	35,00	100,00
3. Tingkat Penanganan Bencana	%	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Rata- Rata Capaian Kinerja						<b>100,00</b>

Sasaran strategis Terciptanya Kelestarian Lingkungan Dan Pengelolaan Kebencanaan Yang Terpadu terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017 sebesar 100 persen.

Sasaran strategis tersebut terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016. Penanganan limbah padat/persampahan di Kabupaten Bireuen sudah menjangkau di 14 (empat belas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2013 diperkirakan sebanyak 160 m<sup>3</sup>/hari. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 60 persen diangkut ke TPA yang berada di Gampong Cot Buket, Kecamatan Peusangan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 40 persen di kelola sendiri oleh masyarakat dengan dipilah untuk dimanfaatkan kembali, dibakar maupun ada juga yang dibuang di sungai.

**Sasaran Strategis 14 :**

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Keamanan Dan Perdamaian

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Jumlah kasus yang mengganggu keamanan dan perdamaian.	Kasus	150	50	300	-	-
Rata- Rata Capaian Kinerja						-	

Sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Keamanan dan Perdamaian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah kasus yang mengganggu keamanan dan perdamaian yang diperkirakan pada tahun 2016 akan timbul sebanyak 150 kasus akan tetapi kasus yang muncul sebanyak 50 kasus dengan rata-rata capaian 300 persen tahun sedangkan capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017 tidak terukur.

**Sasaran Strategis 15 :**

Terbangunnya Kerjasama Lintas Sektor dalam Menjaga Keamanan dan Perdamaian

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017	
		Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Persentase Pertemuan/Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	-
Rata- Rata Capaian Kinerja						-	

Sasaran strategis Terbangunnya Kerjasama Lintas Sektor dalam Menjaga Keamanan dan Perdamaian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pertemuan/rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) ditarget tahun 2016 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan rata-rata capaian 100% tahun sedangkan Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017 tidak diukur.

**Sasaran Strategis 16 :**

Terwujudnya Supremasi Hukum yang Berkeadilan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Persentase penyelesaian tindak pidana	%	30	30	100	-	-
Rata- Rata Capaian Kinerja						-

Sasaran strategis Terwujudnya Supremasi Hukum yang Berkeadilan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian tindak pidana dengan rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang tercantum di atas, tindak pidana yang ditindaklanjuti hingga selesai sebesar 30 persen sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

**Sasaran Strategis 17 :**

Meningkatnya Eksistensi Kelembagaan Adat dalam Mendukung Perdamaian dan Berperan Strategis dalam Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Target Akhir RPJM 2017	Capaian 2016 terhadap akhir RPJM 2017
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Partisipasi lembaga adat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	%	100	100	100	-	-
Rata- Rata Capaian Kinerja						-



Sasaran strategis Meningkatnya Eksistensi Kelembagaan Adat dalam Mendukung Perdamaian dan Berperan Strategis dalam Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Partisipasi lembaga adat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah dengan rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 100 persen. Hal ini dapat di tandai dengan aktifnya para pemangku adat dalam berperanserta setiap kegiatan pemerintahan dan perekonomian masyarakat di daerah.

Beberapa lembaga adat yang selama ini berperan aktif dalam perencanaan, pengawasan dan ikut melaksanakan pembangunan diantaranya panglima laot, tuha peut, tuha lapan, kejruen blang dan lain sebagainya.

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55879 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Nomor 58 tambahan 5679. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Qanun-Qanun Kabupaten Bireuen tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.





Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBK dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun anggaran 2015 dan 2016 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain yang sah, optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah, peningkatan koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan dana perimbangan, pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD dengan penambahan penyertaan modal.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui optimalisasi pendayagunaan potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat lebih memberi kontribusi pada PAD; membuat terobosan dan upaya peningkatan PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.1.674.114.350.446,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.667.681.314.398,74 atau capaian sebesar 99,62%, sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 1.952.340.765.404,38 dengan realisasi sebesar Rp. 1.837.755.025.767,30 atau tingkat capaian sebesar 94,13% (unaudited). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.8**  
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bireuen  
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

No	Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016*		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>167.255.638.456,00</b>	<b>173.972.782.734,16</b>	<b>104,02</b>	<b>199.866.989.814,38</b>	<b>186.205.371.551,23</b>	<b>93,16</b>
1	Hasil Pajak Daerah	15.142.984.256,00	17.648.407.313,00	116,55	19.041.768.799,00	16.537.879.057,00	86,85
2	Hasil Retribusi Daerah	6.423.370.000,00	14.862.066.190,00	231,37	13.763.141.000,00	13.509.255.195,00	98,16
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.869.061.663,00	4.869.061.663,00	100,00	4.869.061.663,00	4.916.471.188,70	100,97
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	140.820.222.537,00	136.593.247.568,16	97,00	158.193.018.352,38	147.181.796.841,53	93,04
5	Pendapatan Zakat	-	-	-	4.000.000.000,00	4.059.969.268,00	101,50
<b>II</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>991.054.761.876,00</b>	<b>984.896.515.695,00</b>	<b>99,38</b>	<b>1.211.257.178.489,00</b>	<b>1.120.470.574.800,00</b>	<b>92,50</b>
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	32.360.330.926,00	26.200.824.745,00	80,97	24.658.231.889,00	24.712.964.929,00	100,22
2	Dana Alokasi Umum	780.023.926.000,00	780.023.926.000,00	100,00	816.856.418.000,00	816.856.418.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	178.670.504.950,00	178.671.764.950,00	100,00	369.742.528.600,00	278.901.191.871,00	75,43
<b>III</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>515.803.950.114,00</b>	<b>508.812.015.969,58</b>	<b>98,64</b>	<b>541.216.597.101,00</b>	<b>531.079.079.416,07</b>	<b>98,13</b>
1	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga	761.369.000,00	92.936.000,00	12,12	407.001.000,00	288.629.000,00	70,92
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.162.963.705,00	30.839.462.560,58	82,98	53.269.610.191,00	43.250.464.505,07	81,19
3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	351.220.439.000,00	351.220.439.000,00	100,00	361.336.751.000,00	361.336.571.000,00	100,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	126.659.178.409,00	126.659.178.409,00	100,00	126.203.414.910,00	126.203.414.910,00	100,00
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>1.674.114.350.446,00</b>	<b>1.667.580.620.698,74</b>	<b>99,61</b>	<b>1.952.340.765.404,38</b>	<b>1.837.755.025.767,30</b>	<b>94,13</b>

\* Unaudited

Sumber Data DPKKD ( Data diolah )



Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan dalam rangka menutup defisit akibat selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun lalu dan penerimaan pinjaman Daerah. Adapun Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Selanjutnya realisasi pembiayaan daerah tahun Anggaran 2015 (sudah diaudit BPK) dan tahun Anggaran 2016 (angka sementara/belum diaudit BPK) sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
Target dan Realisasi  
Pembiayaan Daerah Kabupaten Bireuen  
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

No	Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016*		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penerimaan Pembiayaan	71.222.467.904,01	71.222.467.904,01	100,00	127.054.770.865,34	127.054.770.865,34	100,00
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.222.467.904,01	71.222.467.904,01	100,00	127.054.770.865,34	127.054.770.865,34	100,00
3	Pengeluaran Pembiayaan	4.200.000.000,00	4.199.993.803,00	100,00	3.500.000.000,00	2.999.544.165,00	85,70
4	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	500.000.000,00	-	-
5	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	3.000.000.000,00	2.999.993.803,00	100,00	3.000.000.000,00	2.999.544.165,00	99,98
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>67.022.467.904,01</b>	<b>67.022.474.101,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>2.999.544.165,00</b>	<b>85,70</b>

\* Unaudited

Sumber Data DPKKD ( Data diolah )

Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 67.022.474.101,01 dari anggaran sebesar Rp. 67.022.467.904,01 dengan tingkat capaian 100 persen Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2016



teralisasi sebesar Rp. 123.554.770.865,34 dari anggaran sebesar Rp. 124.055.226.700,34 dengan tingkat capaian 100,41%.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPK, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bireuen tahun 2015 dan tahun 2016 diharapkan manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik yang meliputi antara lain sektor pertanian, ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM, pelayanan sosial dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akuntabilitas.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung ditargetkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.741.136.818.350,01 dengan realisasi sebesar Rp. 1.607.648395.634,41 atau capaian sebesar 92,33%, sedangkan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 2.075.895.536.269,72 dengan realisasi sebesar Rp. 1.936.610.401.831,08 atau capaian sebesar 93,29%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.10**  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen  
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

No.	Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016*		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.045.299.967.640,00</b>	<b>971.051.833.992,41</b>	<b>92,90</b>	<b>1.357.719.399.069,72</b>	<b>1.289.014.973.917,33</b>	<b>94,94</b>
1	Belanja Pegawai	785.721.913.649,01	733.948.025.605,41	93,41	854.060.948.839,00	788.379.887.911,43	92,31
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Hibah	10.608.900.000,00	10.598.900.000,00	99,91	30.360.000.000,00	29.880.000.000,00	98,42
4	Belanja Bantuan Sosial	5.146.500.000,00	4.692.500.000,00	91,18	5.000.000.000,00	4.442.450.000,00	88,85
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2.156.635.426,00	-	-	5.437.026.405,90	3.981.914.697,00	73,24
6	Belanja Bantuan Keuangan KepadaProv/Kab/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	240.666.018.385,00	220.814.051.387,00	91,75	460.861.423.824,82	460.358.608.308,90	99,89
7	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	998.357.000,00	99,84	2.000.000.000,00	1.972.113.000,00	98,61
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>695.836.850.890,00</b>	<b>636.596.561.642,00</b>	<b>91,49</b>	<b>718.176.137.200,00</b>	<b>647.595.427.915,75</b>	<b>90,17</b>
1	Belanja Pegawai	103.311.633.703,00	98.659.841.489,00	95,50	97.296.424.604,00	93.981.696.028,00	96,59
2	Belanja Barang & Jasa	249.942.314.093,00	237.110.195.961,00	94,87	269.709.421.497,00	250.243.237.538,00	92,78
3	Belanja Modal	342.582.903.094,00	300.826.524.192,00	87,81	351.170.291.099,00	303.370.494.349,75	86,39
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>1.741.136.818.350,01</b>	<b>1.607.648395.634,41</b>	<b>92,00</b>	<b>2.075.895.536.269,72</b>	<b>1.936.610.401.833,08</b>	<b>93,29</b>

\* Unaudited

Sumber Data DPKKD ( Data diolah )



**Tabel 3.11**  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Berdasarkan SKPK  
Tahun Anggaran 2015 dan 2016

NO	NAMA SKPK	Tahun 2015			Tahun 2016*		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KDH dan WKDH	769.481.032,00	559.726.833,00	98,94	764.495.964,00	723.996.452,00	94,70
2.	DPRK	9.190.167.764,00	8.107.366.123,00	99,37	9.637.646.181,00	9.581.657.929,00	99,42
3.	Sekretariat Daerah	44.865.799.661,00	42.987.677.115,00	94,63	36.675.485.379,00	34.937.252.049,00	95,26
4.	Sekretariat DPRK	15.487.493.635,00	13.218.364.130,00	94,93	17.881.735.557,00	16.646.029.294,00	93,09
5.	Dinas Syariat Islam	9.647.625.587,00	7.298.969.261,00	97,21	12.109.314.091,00	11.980.540.681,00	98,94
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	571.930.619.334,00	491.620.781.004,00	91,76	598.163.630.988,00	535.895.236.087,00	89,59
7.	Dinas Kesehatan	127.512.852.981,00	109.539.679.902,00	94,74	173.510.934.489,00	151.635.353.233,00	87,40
8.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.385.626.941,00	6.953.214.557,00	99,80	15.951.005.875,00	15.796.235.391,00	99,03
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.17.061.807,00	3.609.412.857,00	98,25	3.835.246.746,00	3.714.797.370,00	96,86
10.	Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika	10.548.907.782,00	9.532.803.135,00	98,03	10.469.352.024,00	10.237.318.727,00	97,78
11.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat	169.613.295.989,00	169.205.525.594,00	99,76	177.616.899.639,00	152.811.089.264,00	86,03
12.	Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi	67.478.667.086,00	34.019.785.962,00	50,42	75.917.453.855,00	74.569.544.979,00	98,22



1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	31.526.835.680,00	28.058.185.355,00	89,00	16.708.464.478,00	13.997.853.980,00	83,78
14.	Dinas Pertanian dan Peternakan	41.487.796.557,00	40.497.837.049,00	97,61	21.891.640.356,00	21.200.348.051,00	96,84
15.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	11.997.049.964,00	11.888.456.610,00	99,09	12.055.130.967,00	11.805.181.372,00	97,93
16.	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.749.835.414,00	16.334.106.057,00	97,52	16.425.399.171,00	14.222.536.660,00	86,59
17.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	36.921.571.056,01	35.880.102.157,41	97,18	12.556.449.804,00	11.844.833.445,00	94,33
18.	DPPKD	259.578.053.811,00	237.103.808.387,00	91,34	34.648.628.022,00	34.007.781.541,43	98,15
19.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.616.817.738,00	4.520.905.601,00	97,92	5.245.769.586,00	5.082.552.201,00	96,89
20.	Dinas Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan	12.191.706.138,00	11.790.803.416,00	96,71	12.556.449.804,00	11.844.833.445,00	94,33
21.	Inspektorat Kabupaten	4.480.380.592,00	4.084.419.271,00	91,16	4.665.815.550,00	4.534.984.467,00	97,20
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.462.322.070,00	8.246.566.782,00	99,45	7.525.220.704,00	7.160.794.122,00	95,16
23.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.837.019.932,00	8.682.898.290,00	80,12	8.274.316.874,00	7.982.894.107,00	96,48
24.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera	14.972.987.072,00	13.547.618.984,00	90,48	14.142.197.198,00	13.649.830.334,00	96,52
25.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	17.245.022.610,00	17.108.171.680,00	99,21	18.395.704.084,00	18.096.297.589,00	98,37
26.	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah	7.731.322.742,00	7.606.423.401,00	98,38	9.324.205.635,00	9.223.727.034,00	98,92
27.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	8.418.964.883,00	8.100.257.900,00	96,21	6.333.134.434,00	6.159.724.324,00	97,26
28.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.345.427.731,00	1.298.159.206,00	96,49	1.709.042.892,00	1.678.224.011,00	98,20
29.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.681.921.074,00	1.633.939.028,00	97,15	2.192.242.559,00	2.142.265.718,00	97,72



1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.384.155.149,00	2.238.079.936,00	93,87	2.326.810.134,00	2.247.728.330,00	96,60
31.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen	141.163.119.382,00	133.612.845.993,00	94,65	144.939.884.935,00	133.825.478.862,75	92,33
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.063.758.476,00	5.999.367.574,00	98,94	3.846.209.913,00	3.689.999.897,00	95,94
33.	Sekretariat BMK	3.396.383.900,00	3.374.970.840,00	99,37	4.418.042.000,00	4.394.512.323,00	99,47
34.	Sekretariat MPU	2.170.707.161,00	2.158.812.988,00	99,45	2.161.764.879,00	2.125.933.005,00	98,34
35.	Sekretariat MPD	765.132.134,00	727.257.661,00	95,05	989.724.985,00	920.035.192,00	92,96
36.	Sekretariat MAA	527.092.095,00	516.854.155,00	98,06	1.703.240.395,00	1.613.023.466,00	94,70
37.	Sekretariat DP Korpri	567.897.430,00	555.686.185,00	97,85	696.936.417,00	675.604.637,00	96,94
38.	Kecamatan Samalanga	3.954.183.150,00	3.910.481.872,00	98,89	4.497.568.787,00	4.364.876.560,00	97,05
39.	Kecamatan Simpang Mamplam	3.782.378.306,00	3.745.123.300,00	99,02	4.087.442.565,00	3.963.429.013,00	96,97
40.	Kecamatan Pandrah	2.294.600.016,00	2.272.636.406,00	99,04	2.361.479.281,00	2.317.085.292,00	98,12
41.	Kecamatan Jeunib	3.640.514.317,00	3.596.261.124,00	98,78	3.882.617.649,00	3.829.621.209,00	98,64
42.	Kecamatan Peulimbang	2.529.747.375,00	2.478.680.018,00	97,98	2.643.798.755,00	2.550.544.192,00	96,47
43.	Kecamatan Peudada	3.483.180.068,00	3.447.802.128,00	98,98	3.692.250.155,00	3.634.534.863,00	98,44
44.	Kecamatan Jeumpa	2.772.800.252,00	2.761.973.210,00	99,61	3.111.127.745,00	3.039.293.195,00	97,69
45.	Kecamatan Kota Juang	2.726.228.522,00	2.636.946.612,00	96,73	2.841.332.632,00	2.774.168.702,00	97,64





1	2	3	4	5	6	7	8
46.	Kecamatan Kuala	2.358.330.689,00	2.254.031.008	95,58	2.483.317.600,00	2.379.114.101,00	95,80
47.	Kecamatan Juli	2.301.484.179,00	2.236.828.863,00	97,19	2.614.799.335,00	2.556.099.896,00	97,76
48.	Kecamatan Peusangan	5.083.467.095,00	5.088.512.986,00	100,10	5.417.132.486,00	5.342.116.378,00	98,62
49.	Kecamatan Jangka	3.348.787.136,00	3.315.922.528,00	99,02	3.668.932.335,00	3.559.546.576,00	97,02
50.	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	2.926.569.512,00	2.840.669.741,00	97,06	3.147.067.794,00	3.068.042.734,00	97,49
51.	Kecamatan Peusangan Selatan	2.018.596.806,00	1.976.799.641,00	99,93	2.269.855.019,00	2.228.392.771,00	98,17
52.	Kecamatan Kuta Blang	3.332.789.417,00	3.309.311.105,00	99,30	3.672.000.096,00	3.596.963.573,00	97,96
53.	Kecamatan Makmur	2.452.537.094,00	2.358.478.942,00	96,16	2.684.503.796,00	2.640.399.268,00	98,36
54.	Kecamatan Gandapura	3.259.848.313,00	3.216.859.561,00	98,68	3.509.186.209,00	3.437.693.506,00	97,96

\* Unaudited

Sumber Data DPKKD ( Data diolah )

